

Bagian VIIIb

**FAKULTAS
HUKUM**

Daftar / si

● PENDAHULUAN	VIIIb.1.1
● VISI, MISI dan TUJUAN	VIIIb.2.1
● PROGRAM PENDIDIKAN	VIIIb.3.1
● FASILITAS	VIIIb.4.1
● STRUKTUR ORGANISASI dan PERSONALIA	VIIIb.5.1
● TENAGA KEPENDIDIKAN	VIIIb.6.1

PENDAHULUAN

Sejak masih bernama Universitas TRISAKTI pada tahun 1966, Fakultas Hukum merupakan salah satu dari tiga fakultas (farmasi, hukum dan ekonomi) yang dimiliki UBAYA. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 172/PT/III/1968, tanggal 5 September 1968, Program Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UBAYA berstatus **Terdaftar**.

Fakultas Hukum UBAYA telah meniti waktu demi waktu dengan semangat dan tekad bulat mewujudkan tujuan yang digariskan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) 1976 – 1983, yaitu menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan analitis, keahlian dan ketrampilan di bidang hukum, berkepribadian baik serta berpartisipasi dalam era pembangunan. Dengan diterbitkannya Pola Umum Pengembangan Jangka Panjang UBAYA 1984, sebagai pengganti RIP 1976 – 1983, Fakultas Hukum UBAYA melakukan pemantapan di bidang kurikulum. Sejalan dengan itu, pada tahun akademik 1982 – 1983 penyelenggaraan pendidikan hukum di Fakultas Hukum UBAYA dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.

Pada tanggal 18 Februari 1985, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 071/O/1985, Fakultas Hukum UBAYA memperoleh status **Diakui**. Selanjutnya, pada tanggal 8 September 1986, dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0611/O/1986, Fakultas Hukum UBAYA memperoleh status akreditasi **Disamakan** untuk 6 jurusan, yakni :

- Jurusan Hukum Perdata
- Jurusan Hukum Pidana
- Jurusan Hukum Administrasi Negara
- Jurusan Hukum Tata Negara
- Jurusan Hukum Internasional
- Jurusan Hukum Acara

Dengan status akreditasi tersebut, Fakultas Hukum UBAYA dipercaya pemerintah untuk menyelenggarakan ujian negara sendiri yang terintegrasi dalam Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Pada tahun 1993, program pendidikan tinggi ilmu hukum mengalami reorientasi pendidikan yang dilaksanakan secara mono-program, menjadi program studi ilmu hukum. Bersama dengan itu pula diberlakukan Kurikulum Nasional (KURNAS) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0325/U/1994. Pada tahun akademik 1994 – 1995 Fakultas Hukum UBAYA mulai berkiprah sekaligus memantapkan cita-cita sebagaimana digariskan dalam **Pola Orientasi Pengembangan**, yang berorientasi pada masyarakat Bisnis-Industri, dengan muatan kurikulum yang mengarah pada Business Law.

Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 326/U/1994 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, telah dilakukan reformasi pendidikan dengan melaksanakan kembali penilaian akreditasi bagi program studi-program studi di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang berstatus **Disamakan**. Tiga program studi di UBAYA, diantaranya **ilmu hukum** dinilai pada akreditasi tahap pertama pada tahun 1996 – 1997. Melalui surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/BAN-PT/Ak.I/ VIII/1998, tanggal 11 Agustus 1998, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA memperoleh peringkat akreditasi A dan mendapat kepercayaan membina program studi sejenis. Peringkat tersebut berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Pada tahun 2003 telah dilakukan akreditasi yang kedua oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap Fakultas Hukum UBAYA. Keputusan BAN PT Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 012/BAN-PT/ Ak-VII/S1/VII/2003 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana Strata-1 di Perguruan Tinggi, memutuskan dan menetapkan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA kembali memperoleh peringkat akreditasi A.

Pada tahun 2011 telah dilakukan akreditasi yang ketiga oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap Fakultas Hukum UBAYA. Keputusan BAN-PT Nomor 025/BAN-PT/Ak-XIV/ IX/ 2011 tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana Di Perguruan Tinggi, memutuskan dan menetapkan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA memperoleh peringkat akreditasi B.

Pada tahun 2015 telah dilakukan akreditasi yang keempat oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap Fakultas Hukum UBAYA. Keputusan BAN-PT Nomor 1257/SK/BAN-PT/Akred/ S/XII/2015 tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana Di Perguruan Tinggi, memutuskan dan menetapkan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBAYA memperoleh peringkat akreditasi B.

Namun demikian setelah dilakukan *surveilance* pada tahun 2016, berdasarkan keputusan BAN-PT No. 1141/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2016, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya dinyatakan terakreditasi dengan peringkat A. Surat keputusan tersebut berlaku sejak 19 Desember 2015 sampai dengan 19 Desember 2020.

Perolehan peringkat akreditasi tersebut layak diperhitungkan dalam pengembangan akademis lebih lanjut sebagai suatu tantangan, karena akreditasi merupakan pengakuan atas program studi pada perguruan tinggi tersebut dalam memenuhi standar kualifikasi tertentu, sehingga lulusannya diharapkan mampu memperoleh kepercayaan pengguna jasa untuk menjalankan praktik profesinya, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

VISI, MISI dan TUJUAN

Visi : Menjadi Fakultas Hukum yang Berkualitas untuk Memenuhi Kebutuhan Hukum bagi Masyarakat.

Makna :

Menjadi Fakultas yang memperoleh apresiasi yang tinggi dari masyarakat karena memiliki kualitas keilmuan dan penerapan di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memiliki kualitas layanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan internasional
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat
3. Mendorong terwujudnya komunitas fakultas hukum untuk mampu berperan aktif di tingkat nasional dan internasional

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam era global
2. Membentuk dan mengembangkan jejaring kerjasama di bidang penelitian dan layanan hukum

PROGRAM PENDIDIKAN

1. Kurikulum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045 Tahun 2002, Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 1999 telah ditinjau kembali dan disempurnakan serta disahkan menjadi kurikulum Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 2004 yang secara efektif telah berlaku terhitung mulai semester gasal tahun akademik 2004 – 2005 dan seterusnya.

Pada tahun 2017, dimulai kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 2017 yang diarahkan untuk mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana dimaksudkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang memuat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Mata kuliah-mata kuliah di Fakultas Hukum dapat dikelompokkan menjadi

1. Kelompok Mata kuliah wajib
2. Kelompok Mata Kuliah Program peminatan:
 - a. Peminatan Keperdataan
 - b. Peminatan Pidana
 - c. Peminatan Ketatanegaraan
 - d. Peminatan dministrasi Negara
 - e. Peminatan Internasional

2. Pelaksanaan Kurikulum

- mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan diasajikan berdasarkan semester dengan memperhitungkan beberapa mata kuliah yang akan tetap disajikan sepanjang semester. Mata Kuliah-mata kuliah tersebut adalah: **Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Filsafat Hukum, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Penalaran Hukum, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara** dengan tetap memperhatikan persyaratan minimal dibukanya kelas sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Universitas.
- Semua mata kuliah yang pernah ditempuh, dihargai dengan sejumlah satuan kredit semester (sks)
- Pengambilan mata kuliah untuk diprogramkan harus memperhatikan alur prasyarat mata kuliah
- Pengambilan ulang mata kuliah yang telah dievaluasi diperkenankan, dengan catatan pengulangan untuk mata kuliah dengan nilai $\geq C$ yang akan diperhitungan adalah **hasil nilai akhir**
- Mahasiswa yang telah mengumpulkan ≥ 100 sks dengan nilai minimal D dapat mengajukan permohonan Program Peminatan (Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, dan Hukum Internasional) sesuai dengan minat dan bakatnya kepada Dekan c.q. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
- Penyusunan skripsi dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh 117 sks, lulus Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum $\geq C$, minimal 2 mata kuliah program peminatan, dan memenuhi persyaratan TOEFL ≥ 400 dengan mengajukan permohonan kepada Dekan c.q. Wakil Dekan I, dilampiri dengan Sertifikat Lulus Masa Orientasi Bersama (khusus angkatan 2005 dan seterusnya).
- Untuk mata kuliah program peminatan, mahasiswa wajib mengambil 14 sks dengan ketentuan sebagai berikut: 10 sks wajib dari mata kuliah di program peminatannya, sedangkan 4 sks diambil dari mata kuliah pada program peminatan lainnya yang akan menunjang skripsi (penulisan hukum).

3. Prasyarat dan Alur Mata Kuliah

Dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan fakultas, maka pada proses pembelajaran dan penyajian mata kuliah perlu ditetapkan prasyarat dan alur mata kuliah sebagaimana terurai dalam tabel 3 dan tabel 4.

4. Syarat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan telah berhasil menyelesaikan Program Sarjana Hukum, apabila memenuhi syarat-syarat:

- telah mengumpulkan ≥ 149 sks
- IP Kumulatif $\geq 2,00$
- tidak ada **nilai E**
- nilai D maksimal 20% dari 149 sks = 30 sks
- lulus ujian skripsi dengan nilai $\geq C$

Tabel 1

**MATAKULIAH PRASYARAT KURIKULUM 2017
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

Mata kuliah Prasyarat adalah mata kuliah yang harus ditempuh terlebih dahulu dengan nilai minimal sebelum menempuh mata kuliah tertentu. Beberapa matakuliah ditentukan mata kuliah prasyarat haruslah sudah ditempuh dengan nilai minimal C yang menunjukkan kompetensi minimal mahasiswa.

Contoh: Hukum Perdata adalah mata kuliah prasyarat bagi Hukum Acara Perdata, mahasiswa harus terlebih dahulu menempuh mata kuliah Hukum Perdata dengan nilai minimal tertentu. (Perhatikan Tabel berikut ini)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MATA KULIAH PRASYARAT	SKS
I. KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN					
1	00141A	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	3		
2		PENDIDIKAN AGAMA:	3		
	00111A	- ISLAM			
	00112A	- KATOLIK			
	00113A	- PROTESTAN			
	00114A	- HINDU			
	00115A	- BUDHA			
	00116A	- KONG HU CU			
3	1201A0245	BAHASA INDONESIA	2		
II. KELOMPOK MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN					
4	1201A0101	Pengantar Ilmu Hukum	4		
5	1201A0102	Pengantar Hukum Indonesia	4		
6	1201A0103	Ilmu Negara	4		
7	1201A0204	Hukum Perdata	4	Pengantar Hukum Indonesia \geq D	4
8	1201A0205	Hukum Pidana	4	Pengantar Hukum Indonesia \geq D	4
9	1201A0309	Hukum Tata Negara	4	Ilmu Negara \geq D	4
10	1201A0206	Hukum Administrasi Negara	4	Ilmu Negara \geq D	4
11	1201A0311	Hukum Dagang	3	Hukum Perdata \geq C	4
12	1201A0207	Hukum Adat	2		
13	1201A0415	Hukum Islam	2		
14	1201A0208	Hukum Internasional	4	Pengantar Hukum Indonesia \geq D	4
15	1201A0312	Hukum Agraria/Tanah	4	Hukum Adat \geq D	2
16	1201A0314	Hukum Acara Perdata	3	Hukum Perdata \geq C	4
17	1201A0310	Hukum Acara Pidana	3	Hukum Pidana \geq C	4
18	1201A0531	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	Hukum Administrasi Negara \geq C	4
19	1201A0637	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	Hukum Tata Negara \geq C	4
20	1201A0634	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	2	Hukum Perdata \geq C	4
				Hukum Pidana \geq C	4
				Hukum Administrasi Negara \geq C	4
				Hukum Tata Negara \geq C	4
				Hukum Internasional \geq C	4

III. KELOMPOK MATA KULIAH KEAHLIHAN BERKARYA					
21	1201A0743	PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)		KETERANGAN: SYARAT PENGAMBILAN MATAKULIAH PLKH ADALAH TELAH MENEMPUH SEMUA MATA KULIAH DI BAWAH INI DENGAN NILAI MINIMAL \geq D, YAITU: HUKUM ACARA PERDATA, HUKUM ACARA PIDANA, HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN MINIMAL 2 MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN	
		KEAHLIAN LITIGASI:			
		PRAKTIK PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA			
		PRAKTIK PERADILAN HUKUM ACARA PIDANA			
		PRAKTIK PERADILAN HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA			
		KEAHLIAN NON LITIGASI:	6		
		PRAKTIK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
		PRAKTIK MEDIASI DI PENGADILAN			
		PRAKTIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL			
		PRAKTIK PENDAMPINGAN PEREMPUAN DAN ANAK			
		PRAKTIK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE			
22	1201A0744	SKRIPSI/TUGAS AKHIR	4	KETERANGAN: PENGAJUAN PROPOSAL SKRIPSI/TUGAS AKHIR ADALAH TELAH MENEMPUH \geq 117 SKS, TERMASUK MATA KULIAH METODE PENELITIAN HUKUM DENGAN NILAI \geq C DAN MINIMAL 2 MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN	
IV. KELOMPOK MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA					
23	1201A0742	FILSAFAT HUKUM	4	PENGANTAR ILMU HUKUM \geq D	4
V. KELOMPOK MATA KULIAH KEHIDUPAN BERSAMA					
24	1201A0527	HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL	2	HUKUM PERDATA \geq C	4
				HUKUM PIDANA \geq C	4
				HUKUM ADMINISTRASI NEGARA \geq C	4
				HUKUM TATA NEGARA \geq C	4
25	1201A0522	HAK ASASI MANUSIA	2	HUKUM TATA NEGARA \geq C	4

VI. KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB UMUM					
26	00131A	ETIKA MULTIKULTURAL	2		
27	1201A0146	BAHASA INGGRIS	2		
28	1201A0447	KEWIRAUSAHAAN	3		
29	1201A0741	METODE PENELITIAN HUKUM	2	BAHASA INDONESIA \geq D	2
				HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL \geq D	2
30	1201A0638	HUKUM LINGKUNGAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA \geq C	4
31	1201A0525	NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI	2	HUKUM TATA NEGARA \geq C	4
32	1201A0635	PEMERINTAHAN DAERAH	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA \geq C	4
33	1201A0530	ORGANISASI INTERNASIONAL	2	HUKUM INTERNASIONAL \geq C	4
34	1201A0421	HUKUM LAUT	2	HUKUM INTERNASIONAL \geq C	4
35	1201A0526	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI	2	HUKUM PIDANA \geq C	4
36	1201A0740	PENALARAN HUKUM	2	HUKUM PERDATA \geq C	4
				HUKUM PIDANA \geq C	4
				HUKUM ADMINISTRASI NEGARA \geq C	4
				HUKUM TATA NEGARA \geq C	4
37	1201A0528	HUKUM KEWARGANEGARAAN	2		4
38	1201A0416	HUKUM PERIKATAN	3	HUKUM PERDATA \geq C	4
39	1201A0313	HUKUM PAJAK	3		4
40	1201A0419	HUKUM PERSEKUTUAN	2	HUKUM DAGANG \geq D	3
41	1201A0523	HUKUM PERIZINAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA \geq C	4
42	1201A0417	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	2	HUKUM PERDATA \geq C	4
43	1201A0420	HUKUM PERBURUHAN	2	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA \geq C	4
44	1201A0633	KEJAHATAN EKONOMI	2	HUKUM PIDANA \geq C	4
45	1201A0636	HUKUM PENANAMAN MODAL	2		4
46	1201A0739	HAK MILIK INTELEKTUAL	2	HUKUM DAGANG \geq D	3
47	1201A0418	HUKUM ASURANSI	2	HUKUM DAGANG \geq D	3
48	1201A0529	HUKUM JAMINAN	2	HUKUM PERIKATAN \geq D	3
49	1201A0632	HUKUM PENGANGKUTAN	3	HUKUM DAGANG \geq D	3
50	1201A0524	HUKUM PERBANKAN	2	HUKUM PERDATA \geq C	4
				HUKUM ADMINISTRASI NEGARA \geq C	4
VII. KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN					
PROGRAM PEMINATAN KEPERDATAAN					
51	1201A1601	HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH \geq 100 SKS DENGAN NILAI HUKUM PERDATA MINIMAL \geq C	
52	1201A1602	HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	2		
53	1201A1603	TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL	2		
54	1201A1604	HUKUM KEPAILITAN	2		
55	1201A1605	HUKUM PASAR MODAL	2		
56	1201A1606	HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA	2		
57	1201A1607	ARBITRASE PERDAGANGAN INTERNASIONAL	2		

PROGRAM PEMINATAN PIDANA				
58	1201A1608	KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH \geq 100 SKS DENGAN NILAI PIDANA MINIMAL \geq C
59	1201A1609	HUKUM PENITENSIER	2	
60	1201A1610	KEJAHATAN KORPORASI	2	
61	1201A1611	KEJAHATAN SIBER	2	
62	1201A1612	HUKUM FORENSIK	2	
63	1201A1613	KEJAHATAN TRANSNASIONAL	2	
64	1201A1614	SISTEM PERADILAN ANAK DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	2	
PROGRAM PEMINATAN ADMINISTRASI NEGARA				
65	1201A1615	HUKUM KEUANGAN NEGARA	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH \geq 100 SKS DENGAN NILAI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MINIMAL \geq C
66	1201A1616	HUKUM KESEHATAN	2	
67	1201A1617	HUKUM TATA RUANG	2	
68	1201A1618	HUKUM KEPEGAWAIAN	2	
69	1201A1619	HUKUM PELAYANAN PUBLIK	2	
70	1201A1620	HUKUM RUMAH SUSUN/KONDOMINIUM	2	
71	1201A1621	HUKUM KEIMIGRASIAN DAN KEPABEANAN	2	
PROGRAM PEMINATAN INTERNASIONAL				
72	1201A1622	HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH \geq 100 SKS DENGAN NILAI HUKUM INTERNASIONAL MINIMAL \geq C
73	1201A1623	HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	2	
74	1201A1624	HUKUM HUMANITER	2	
75	1201A1625	HUKUM PERADILAN INTERNASIONAL	2	
76	1201A1626	HUKUM UDARA DAN ANGKASA	2	
77	1201A1627	HUKUM EKSTRADISI	2	
78	1201A1628	HUKUM PENGUNGSI	2	
PROGRAM PEMINATAN KETATANEGARAAN				
79	1201A1629	KEPARTAIAN & ORGANISASI MASYARAKAT	2	KETERANGAN: SYARAT UNTUK MENGAMBIL MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN ADALAH TELAH MENEMPUH \geq 100 SKS DENGAN NILAI HUKUM TATA NEGARA MINIMAL \geq C
80	1201A1630	KEKUASAAN YUDISIIL	2	
81	1201A1631	HUKUM PEMILIHAN UMUM	2	
82	1201A1632	HUKUM KONSTITUSI	2	
83	1201A1633	PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA	2	
84	1201A1634	KELEMBAGAAN NEGARA	2	
85	1201A1635	PERLINDUNGAN HAK BAGI KELOMPOK MINORITAS	2	

Tabel 2

MATA KULIAH FAKULTAS HUKUM KURIKULUM 2017

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
I	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	00141A	3
	PENDIDIKAN AGAMA		
	- ISLAM	00111A	
	- KATOLIK	00112A	
	- PROTESTAN	00113A	
	- HINDU	00114A	
	- BUDHA	00115A	
	- KONG HU CU	00116A	
	BAHASA INGGRIS	1201A0146	2
	PENGANTAR ILMU HUKUM	1201A0101	4
	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	1201A0102	4
	ILMU NEGARA	1201A0103	4
TOTAL			20

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
III	HUKUM ACARA PIDANA	1201A0310	3
	HUKUM TATA NEGARA	1201A0309	4
	HUKUM DAGANG	1201A0311	3
	HUKUM AGRARIA/TANAH	1201A0312	4
	HUKUM PAJAK	1201A0313	3
	HUKUM ACARA PERDATA	1201A0314	3
TOTAL			20

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
V	HAK ASASI MANUSIA	1201A0522	2
	HUKUM PERIZINAN	1201A0523	2
	HUKUM PERBANKAN	1201A0524	2
	NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI	1201A0525	2
	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI	1201A0526	2
	HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL	1201A0527	2
	HUKUM KEWARGANEGARAAN	1201A0528	2
	HUKUM JAMINAN	1201A0529	2
	ORGANISASI INTERNASIONAL	1201A0530	2
	HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	1201A0531	2
TOTAL			20

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
II	HUKUM PERDATA	1201A0204	4
	HUKUM PIDANA	1201A0205	4
	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1201A0206	4
	HUKUM ADAT	1201A0207	2
	BAHASA INDONESIA	1201A0245	2
	HUKUM INTERNASIONAL	1201A0208	4
TOTAL			20

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
IV	HUKUM ISLAM	1201A0415	2
	HUKUM PERIKATAN	1201A0416	3
	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	1201A0417	2
	HUKUM ASURANSI	1201A0418	2
	HUKUM PERSEKUTUAN	1201A0419	2
	HUKUM PERBURUHAN	1201A0420	2
	ETIKA MULTIKULTURAL	00131A	2
	KEWIRAUUSAHAAN	1201A0447	3
	HUKUM LAUT	1201A0421	2
TOTAL			20

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
VI	HUKUM PENGANGKUTAN	1201A0632	3
	KEJAHATAN EKONOMI	1201A0633	2
	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1201A0634	2
	PEMERINTAHAN DAERAH	1201A0635	2
	HUKUM PENANAMAN MODAL	1201A0636	2
	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	1201A0637	2
	HUKUM LINGKUNGAN	1201A0638	2
	2 MATA KULIAH PROGRAM PEMINATAN		4
TOTAL			19

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
VII	HAK MILIK INTELEKTUAL	1201A0739	2
	PENALARAN HUKUM	1201A0740	2
	METODE PENELITIAN HUKUM	1201A0741	2
	FILSAFAT HUKUM	1201A0742	4
	5 MATAKULIAH PROGRAM PEMINATAN		10
TOTAL			20

SEMESTER	MATA KULIAH	KODE	sks
VIII	PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM	1201A0743	6
	SKRIPSI/TUGAS AKHIR	1201A0744	4
TOTAL			10

4. Pedoman Umum Penyusunan Skripsi

4.1 Pengertian

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan penelitian lapangan dan/atau kepustakaan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), sesuai dengan program kekhususannya.

4.2 Persyaratan pengajuan

Mahasiswa yang sudah mengumpulkan 117 sks diperkenankan mengajukan permohonan penulisan skripsi dan didahului dengan proposal skripsi.

4.3 Proposal Skripsi

Sebelum mahasiswa membuat skripsi terlebih dahulu mahasiswa harus membuat proposal skripsi, yang terdiri dari:

- Latar Belakang Masalah
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penulisan
- Metodologi
- Pertanggungjawaban Sistematika
- Bahan Bacaan Awal (minimal 5 buku)

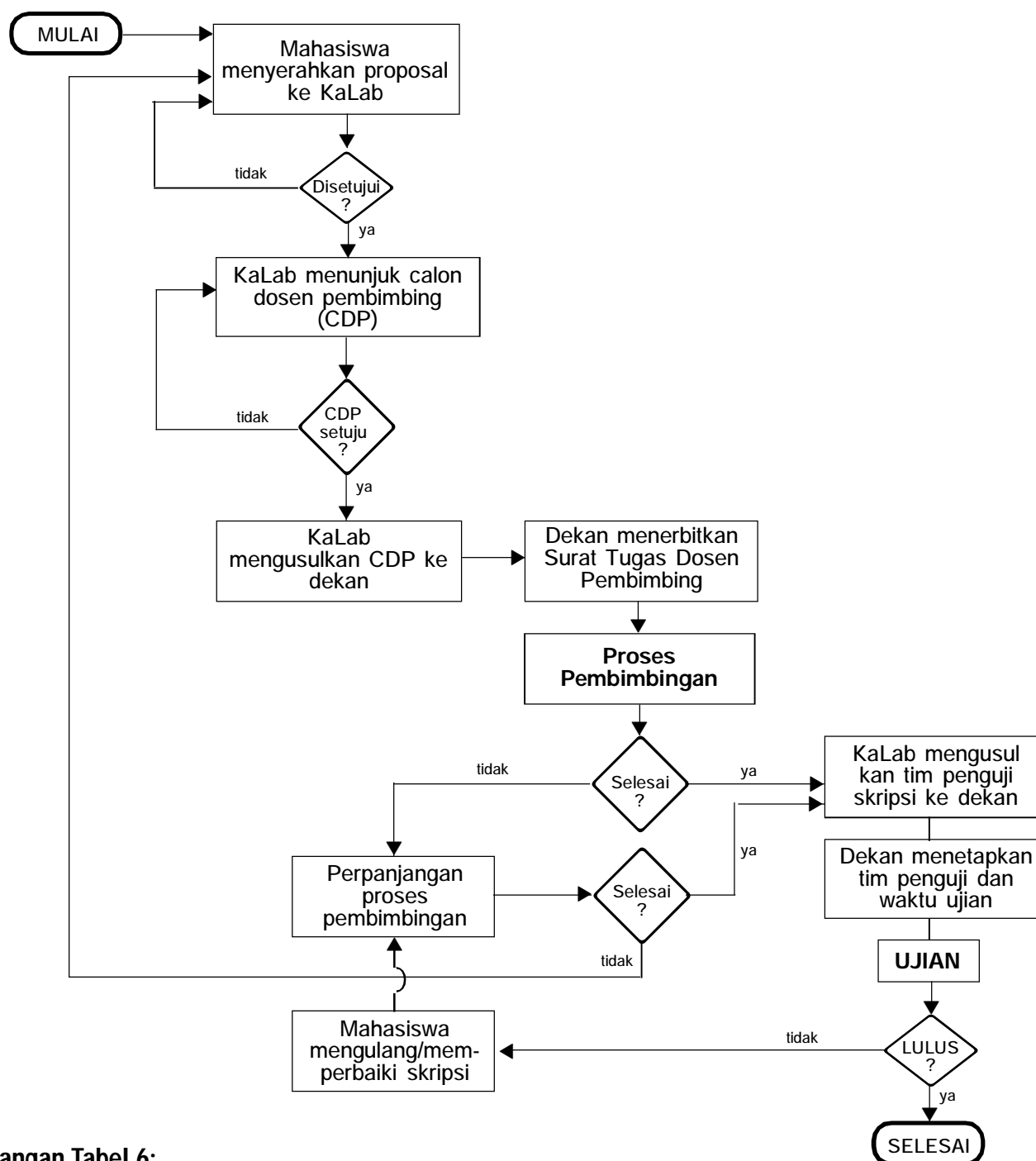
4.4 Untuk Penulisan skripsi lebih lanjut mengikuti Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 183 Tahun 2018.

Untuk itu diperhatikan:

- Penulisan kutipan dengan format APA
- Penulisan daftar referensi dengan format APA

Tabel 4

ALUR dan TATA CARA PENYUSUNAN SKRIPSI



Keterangan Tabel 6:

- ⊙ Bimbingan skripsi dilaksanakan selama jangka waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Tugas bimbingan;
- ⊙ Bila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut di atas penyusunan skripsi belum selesai / siap untuk diuji, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan bimbingan selama 6 bulan;
- ⊙ Bila masa perpanjangan berakhir dan skripsi tetap belum selesai/siap diuji, maka penyusunan skripsi tersebut dinyatakan gugur .

FASILITAS

1. Laboratorium

Merupakan penunjang pelaksana (psikomotor) di bidang pendidikan akademik dan profesional yang meliputi kemampuan litigasi dan non-litigasi yang digunakan untuk praktik bagi mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.

2. Ruang Pengadilan Semu (Moot Court)

Merupakan tempat pelatihan praktik mahasiswa di bidang litigasi untuk semua jenis perkara serta praktik bagi peserta mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum untuk menjadi praktisi yang profesional.

3. Biro Bantuan Hukum (BBH)

Merupakan salah satu kegiatan di bidang pengabdian masyarakat antara lain pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi masyarakat/pencari keadilan.

4. Pusat Kajian/Kelompok kajian

Merupakan unsur pelaksana dari laboratorium-laboratorium yang ada di Fakultas Hukum dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan akademik, antara lain kelompok Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Kantor Layanan Hukum (KLH)

Wadah perwujudan University - Industry - linkages, yang kegiatannya meliputi:

- Konsultasi hukum bisnis, hukum perbankan, hukum perburuhan, hak kekayaan intelektual/hak cipta, paten, dan merek
- Pelatihan yang berkaitan dengan hukum bisnis
- Seminar dan Short Course
- Negosiasi, mediasi
- Litigasi di bidang: hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi/perburuhan

6. English Course

Kursus Bahasa Inggris setara TOEFL ini diselenggarakan oleh fakultas untuk para mahasiswa semester genap tahun ketiga agar mereka siap menerima perkuliahan yang disampaikan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Kursus ini bersifat wajib dengan passing grade ≥ 400 .

7. Koleksi Khusus

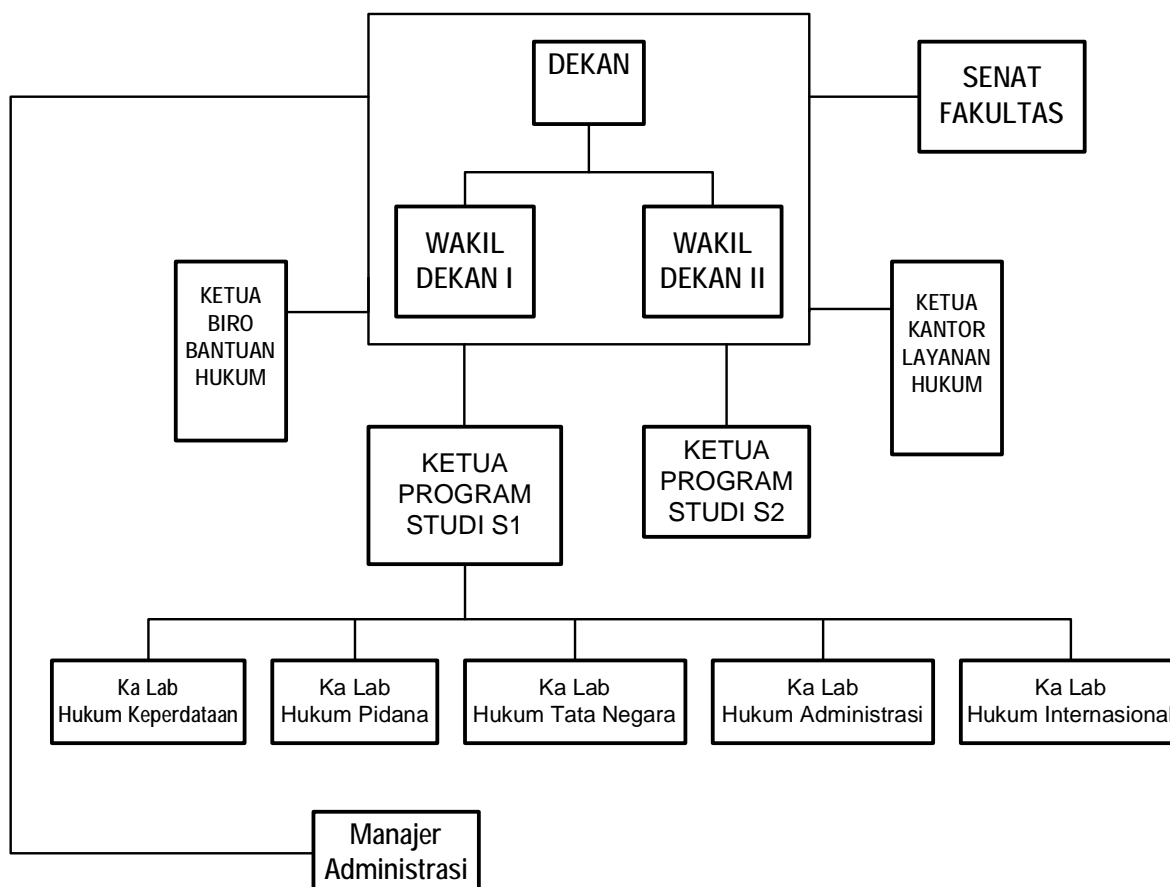
Merupakan perpustakaan fakultas yang berupa sarana penunjang pendidikan hukum, dalam bentuk literatur, artikel, jurnal, makalah, penelitian, dan peraturan perundang-undangan di bidang hukum.

8. Media Hukum

Untuk menampung pemikiran ilmiah tentang hukum yang selalu berkembang bagi para akademisi dan ahli-ahli hukum lainnya, Fakultas Hukum Universitas Surabaya menerbitkan jurnal YUSTIKA yang terbit dua kali setiap tahun.

STRUKTUR ORGANISASI dan PERSONALIA

1. Struktur Organisasi



2. Personalia

Dekan	: Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
Wakil Dekan I	: Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
Wakil Dekan II	: Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	: Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan	: Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
Ketua Laboratorium	
- Hukum Keperdataan	: Dr. Sylvia Janisriwati, S.H., M.Hum.
- Hukum Pidana	: Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.
- Hukum Tata Negara	: Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
- Hukum Administrasi	: Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.
- Hukum Internasional	: Suhariwanto, S.H., M.Hum.
Ketua Non Laboratorium	: Ex Officio Dekan Fakultas Hukum
Kepala Biro Bantuan Hukum	: Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.
Koordinator Kantor Layanan Hukum	: Ex Officio Dekan Fakultas Hukum
Manajer Administrasi	: Haryo Wicaksono, A.Md.

TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dosen Tetap

NO.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1.	175002	Prof. Dr. H. Eko Sugitarto, S.H., C.N., M.Hum.	- Hukum Tata Negara
2.	195042	Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.	- Hukum Pajak - Hukum Perdata Waris
3.	178009	Dr. H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.	- Hukum Keuangan Negara - Pemerintahan Daerah
4.	179006	H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.	- Hukum Dagang - Negara Hukum dan Demokrasi
5.	191001	Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.	- Organisasi Internasional
6.	197025	Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.	- Hukum Penanaman Modal
7.	186018	Suhariwanto, S.H., M.Hum.	- Hukum Perburuhan - Hukum Internasional
8.	180001	H. Sudarsono, S.H., M.S.	- Hukum Tata Negara - Hukum Waris Adat
9.	182003	Irti Windra Syahrial, S.H., M.S.	- Hak Milik intelektual - Hukum Perdata
10.	189019	Sriwati, S.H., M.Hum.	- Hukum Agraria / Tanah
11.	186017	Elly Hernawati, S.H., M.Hum.	- Hak Milik Intelektual - Hukum Islam
12.	188003	Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., M.H.	- Organisasi Internasional - Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
13.	187036	Yusrambono, S.H., M.Si.	- Hukum Asuransi
14.	189002	Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.	- Hukum Kewarganegaraan - Pemerintahan Daerah
15.	196008	Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.	- Hak Milik Intelektual - Hukum Asuransi
16.	181005	Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.	- Hukum Agraria / Tanah
17.	187022	H. Martono, S.H., M.Si.	- Hak Asasi Manusia
18.	200059	Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.	- Perjanjian Internasional
19.	197002	Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M.Hum.	- Hukum Lingkungan (AMDAL & ADR)
20.	201019	Dr. Sylvia Janisriwati, S.H., M.Hum.	- Hukum Kepailitan - Hukum Perbankan
21.	197002	Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.	- Viktimologi dan Kriminologi - Hukum Pidana
22.	201040	Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	- Hukum Administrasi Negara
23.	203015	Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.	- Hukum Pidana - Kejahatan Ekonomi
24.	204023	Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.	- Kejahatan Siber - Kejahatan Ekonomi (Tindak Pidana Pencucian Uang)

NO.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
25.	207013	Marlina S.H., M.Hum.	- Hukum Laut
26.	210035	Hwian Christianto, S.H., M.Hum	- Kapita Selecta Hukum Pidana - Kejahatan Korporasi
27.	196027	Dra. Anastasia Innurtrisniyati, M.S.i.	- Pancasila dan Kewarganegaraan - Etika Multikultural
28.	212004	Paula Swandayani Hartanto, S.H., M.Kn.	- Hukum Persaingan Usaha - Hukum Kontrak
29.	215014	Nabbilah Amir, S.H., M.H.	- Hukum Tata Ruang
30.	215020	Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.	- Kejahatan Siber
31.	215033	Soetrisno, S.H., M.Hum.	- Hukum Persekutuan, Hukum Adat
32.	216055	Edy Hendrawan, S.H., M.H.	- Hukum Perusahaan
33.	216056	Wendy Agus Budiawan, S.H., M.H.	- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
34.	216077	Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum.	- Kejahatan Korporasi
35.	216003	Erly Aristo, S.H., M.Kn.	- Hukum Agraria
36.	217007	Dr. Mas Rara Tri Retno Herryani, S.H., M.Hum.	- Hukum Kontrak
37.	217012	Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.	- Hukum Internasional
38.	217025	Henry Soegeng, S.H., H.Hum., MBA.	- Hukum Lingkungan, HAN

3. Dosen MIPA / MKU Tidak Tetap

NO.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1.	209112	Drs. Ali Fauzi, M.Si.	- Agama Islam
2.	209115	Drs. Harimullah, M.Si.	- Agama Islam
3.		Siti Zuraida, S.H., M.Hum.	- Agama Islam
4.	202046	M. Arbi Hidayat, S.Si., M.Si.	- Agama Islam
5.	212146	Ali Mahsun, M.Pd.I.	- Agama Islam
6.	214131	Mahsan, S.Hi., M.Pd.I.	- Agama Islam
7.	209102	Drs. Josep Sintar	- Agama Katolik
8.	210242	Drs. A.W. Susmono, M.MPd.	- Agama Katolik
9.	179016	Soetrisno, S.H., M.Hum.	- Agama Katolik
10.	209109	Thomas Bejo Utomo, S.Th., M.A.	- Agama Protestan
11.	213145	Yakop C.K. Saragih, S.Si.	- Agama Protestan
12.	213146	Pdt. Ponco Mujiono Basuki, S.Th., M.Mis.	- Agama Protestan
13.	209107	Tosin, S.H., M.H.	- Agama Budha
14.	209111	Irwan Pontoh, S.E., M.Psi.	- Agama Budha
15.	209114	Ida Bagus Kartika Dewi, S.E., M.Psi.	- Agama Budha
16.		Sujana, S.Pd.B.	- Agama Budha
17.	210243	Dra. Ni Wayan Suarmini, M.Sc.	- Agama Hindu
18.	211149	Ni Putu Swasti, S.E., S.Pd.H., M.Pd.H.	- Agama Hindu
19.	210250	Tan Djin Meng, S.T.	- Agama Khonghucu
20.	209113	Dr. Oesman Arif, M.Pd.	- Agama Khonghucu
21.	209100	Prof. Dr. L. Dyson, S.T.	- Etika Multikultural
22.	206701	Drs. Haryadi, M.Si.	- Etika Multikultural
23.	200606	Drs. Priyatmoko, M.A.	- Etika Multikultural
24.	186005	Dra. Edna Sri Redjeki	- Etika Multikultural
25.	212004	Paula Swandayani Hartanto, S.H., M.Kn.	- Etika Multikultural
26.	209008	Olly Wicaksono Pratamasari, S.E., M.MT.	- Etika Multikultural
27.	191001	Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S.	- Pancasila dan Kewarganegaraan

NO.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
28.	187036	Yusrambono, S.H., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
29.	187022	Dr. Martono, S.H., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
30.	206702	Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
31.	178009	Dr. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
32.	180001	Sudarsono, S.H., M.S.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
33.	196027	Drs. Anastasia Innurtrisniyati, M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
34.	179008	Drs. ec. Noerjanto, M.M.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
35.	184008	Supriono, S.H., M.Hum.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
36.	209103	Dr. Heri Suharyanto	- Pancasila dan Kewarganegaraan
37.	212142	Nanang Haryono, S.IP., M.Si.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
38.	210243	Dra. Ni Wayan Suarmini, M.Sc.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
39.	215100	Poernomowati, S.H., M.M., M.H.	- Pancasila dan Kewarganegaraan
40.	179006	Heru Susanto, S.H., M.Hum.	- Pancasila dan Kewarganegaraan

4. Dosen Tidak Tetap

NO.	NPK	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1.	179013	Henry Soegeng, S.H., M.Hum., MBA.	- Hukum Administrasi Negara - Hukum Perizinan
2.	209134	Prof. Dr. Dr. Med. H. Soekri Erfan Kusuma	- Hukum Forensik
3.	212159	Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.	- Hukum Acara Pidana - Hukum Kepailitan
4.	184091	Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.	- Hukum Jaminan - Hukum Perbankan
5.	186006	Drs. ec. Soedarjanto, PS., M.S.	- Dasar-dasar Manajemen
6.	184008	Supriono, S.H., M. Hum.	- Hukum Pengangkutan
7.	208701	Dr. Drs. Besin Gaspar, M.Pd.	- Bahasa Inggris
8.	179016	Soetrisno, S.H., M.Hum.	- Hukum Perubahan Sosial - Hukum Adat
9.	206014	Yenny Hartanto, S.E., M.Pd.	- Bahasa Inggris
10.	208234	Rusli Dewi, M.Pd.	- Bahasa Inggris
11.		Siti Zuraida, S.H., M.Hum.	- DDM - Hukum Islam

9. Penutup

Dengan pelaksanaan yang konsisten disertai dukungan yang tulus dari segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Insya Allah Kurikulum baru ini dapat membantu memperlancar realisasi visi, misi, dan tujuan Fakultas hukum sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam naskah Strategic Planning Fakultas Hukum Universitas Surabaya 2011-2018.